

Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan

Yusfin Paskissing² Muhammad Nasir¹ & Syamsu Nujum¹

¹Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia

²Koresponden Penulis, E-mail: y_parkissing@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) menganalisa pola pertumbuhan ekonomi dan pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; (2) menganalisa tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; (3) menguji Hipotesis Kuznets di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu melakukan studi kepustakaan dari publikasi data-data statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber pustaka lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2015–2019: (1) perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, tapi lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional; (2) Berdasarkan Tipologi Klassen, Provinsi Sulawesi Selatan hanya terdiri atas empat tipologi wilayah yaitu Daerah Cepat–Maju dan Cepat–Tumbuh, Daerah Maju Tapi Tertekan, Daerah Berkembang Cepat; dan Daerah Relatif Tertinggal; (3) Hipotesis U Terbalik Kuznet tidak berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan di mana hubungan antara angka indeks Williamson dan indeks Entropi Theil tidak menunjukkan kurva U Terbalik.

Kata Kunci: Pertumbuhan; Ketimpangan; Ekonomi; Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

This research was conducted with the objectives of: (1) analyzing patterns of economic growth and classification of districts / cities in South Sulawesi Province; (2) analyzing the level of economic inequality between districts / cities in South Sulawesi Province; (3) testing the Kuznets Hypothesis in South Sulawesi Province. This research uses secondary data, namely through literature studies from the publication of statistical data by the Central Statistics Agency (BPS) and other literature sources that are relevant to the research topic. The results of this study indicate that during the 2015–2019 period: (1) the economy of South Sulawesi Province experienced fluctuating growth, but higher than the national economic growth; (2) Based on Klassen's typology, South Sulawesi Province only consists of four regional typologies, namely Fast-Forward and Fast-Growing Areas, Advanced But Depressed Areas, Fast Developing Areas; and Relatively Disadvantaged Areas; (3) Kuznet's Inverted U hypothesis does not apply in South Sulawesi Province where the relationship between Williamson index and Theil's Entropy index does not show an Inverted U curve.

Keyword: Growth; Inequality; Economy; Local government.

PENDAHULUAN

Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa melainkan juga antar Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin) (Julio & Marwoto, 2019). Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997).

Adanya kecenderungan perbedaan perkembangan pembangunan antar wilayah di Indonesia terutama antara Pulau Jawa dengan luar Jawa menimbulkan kesenjangan kesejahteraan sehingga kadang memunculkan keinginan dari daerah luar Pulau Jawa untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sukwika, 2018). Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 1999). Sehingga keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisiensi (Arief & Djanggih, 2020).

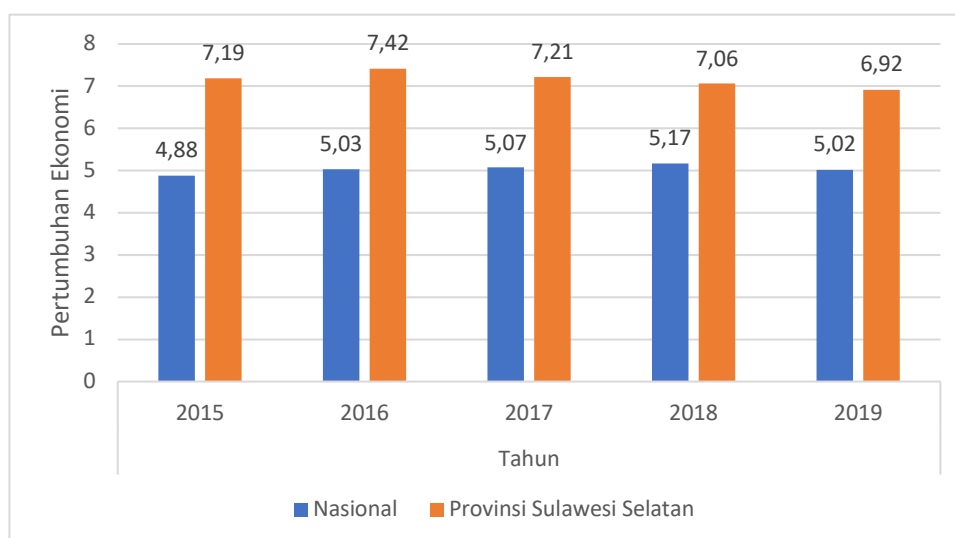
Selain ketimpangan pembangunan ekonomi secara umum, disparitas pendapatan akan timbul dalam proses pembangunan. Menurut Kuznet (1955), bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan menaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal dengan sebagai kurva Kuznet "U-Terbalik", karena perubahan longitudinal (*time series*) dalam distribusi pendapatan.

Sejak era reformasi tahun 1999 terjadi perubahan model sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi (otonomi daerah) (Romli, 2008). Hal ini berarti beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Sidik, 2002). Perubahan model tersebut mengakibatkan bergesernya sebagian fungsi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang antara lain di bidang ekonomi yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah serta upaya-upaya pencarian sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui potensi yang dimiliki masing-masing daerah otonomi (Kuncoro, 2007). Sehingga pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah tersebut dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas untuk pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Tuasikal, 2008).

Maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya. Indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan baik di dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah.

Gambar 1.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015 -2019



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2015–2019 fluktuatif dan cenderung menurun, namun demikian laju pertumbuhannya tetap melewati laju pertumbuhan nasional (Gambar 1).

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

	Lapangan Usaha	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107.420,35	66.658,84
2	Pertambangan dan Penggalian	23.304,30	17.237,90
3	Industri Pengolahan	66.430,14	44.832,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	318,61	310,62
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	476,36	369,70
6	Konstruksi	71.559,99	41.232,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	74.702,37	51.442,42
8	Transportasi dan Pergudangan	21.345,19	11.982,70

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.112,19	4.895,97
10	Informasi dan Komunikasi	25.485,62	23.339,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.495,05	11.186,15
12	Real Estat	18.407,59	11.276,11
13	Jasa Perusahaan	2.370,75	1.507,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	23.328,53	14.423,36
15	Jasa Pendidikan	26.538,45	18.410,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.163,10	6.708,17
17	Jasa Lainnya	7.288,27	4.791,50
	Jumlah	504.746,87	330.605,13

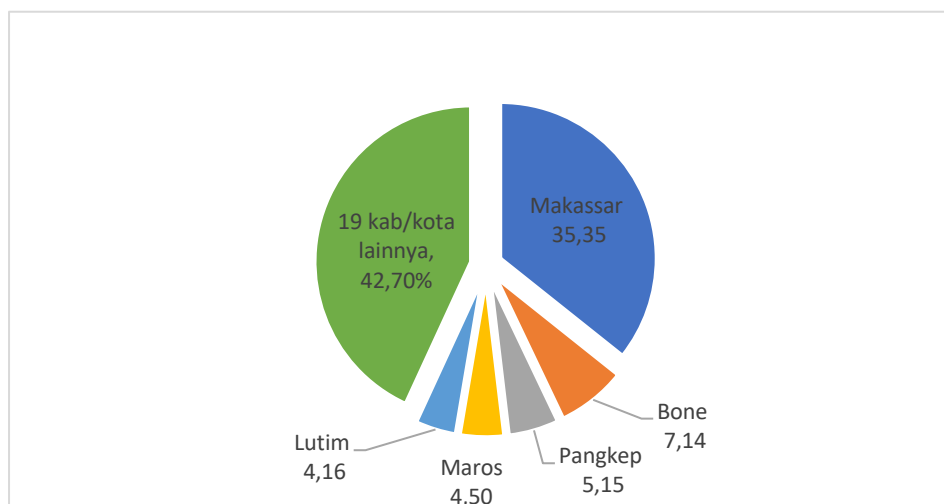
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

PDRB Sulawesi Selatan atas harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 504.746,87 milyar rupiah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai nilai tambah paling besar dibandingkan sektor lain yaitu mencapai 107.420,35 milyar rupiah. Selanjutnya disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terbesar kedua dengan nilai mencapai 74.702,37milyar rupiah. Sedangkan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan atas harga konstan 2000 pada tahun 2019 sebesar 250 802,99 milyar rupiah (Tabel 1).

Total PDRB kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2019 tercatat sekitar 504.746,87 milyar rupiah, lebih dari separuhnya atau sekitar 56,29 persen adalah kontribusi dari peringkat 5 besar yaitu Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros dan Kabupaten Luwu Timur.

Gambar 2

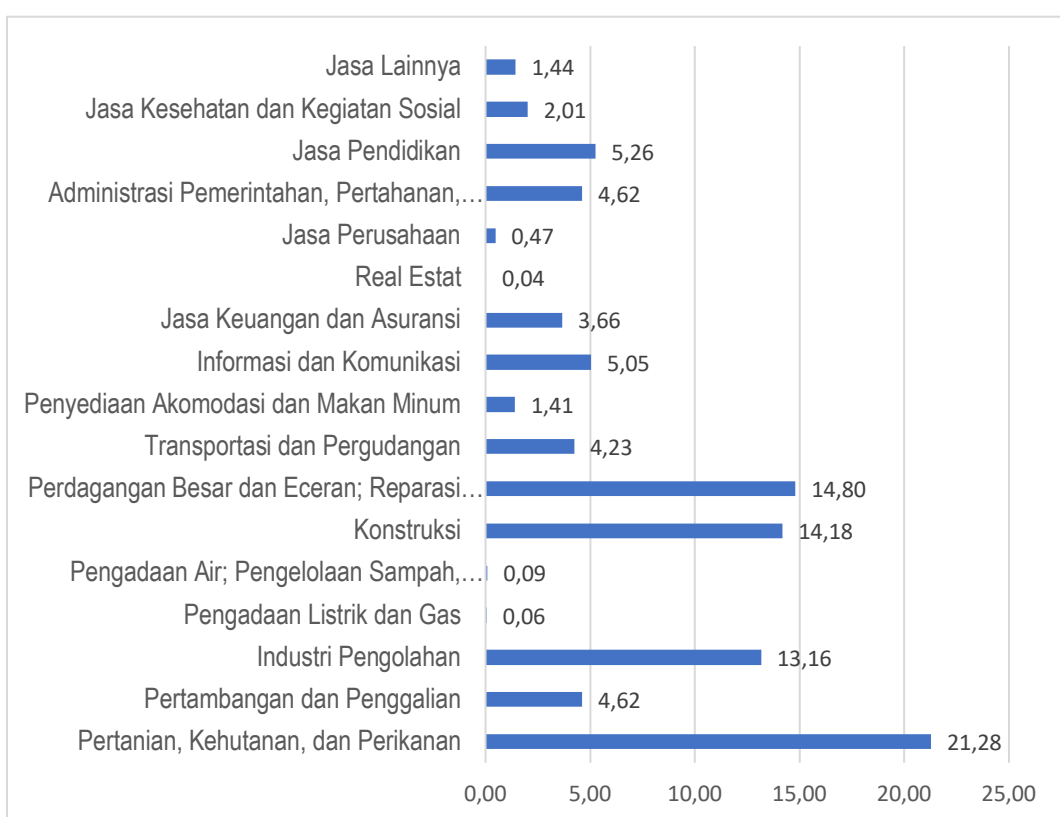
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terbesar Terhadap total PDRB Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah

Sampai dengan tahun 2019 kontribusi PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih terkonsentrasi pada daerah tersebut terutama di Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan barang dan jasa. Kabupaten Bone didominasi pertanian, kehutanan, dan perikanan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan aktivitas industri pengolahan semennya, Kabupaten Luwu Timur yang lebih banyak didominasi oleh aktivitas pertambangan dan penggalian nikel, sedangkan Kabupaten Maros oleh aktivitas transportasi (Gambar 2).

Gambar 3.
PDRB Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Selatan Atas Harga Berlaku Tahun 2019



Sumber:
BPS
Provinsi
Sulawesi
Selatan,
diolah

Bervariasinya kontribusi PDRB antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, seperti perbedaan sumber daya alam, faktor-faktor produksi, infrastruktur penunjangnya dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut. Perbedaan ini mengakibatkan besarnya PDRB di setiap daerah/wilayah berbeda cukup besar, hal ini digambarkan dengan kontribusinya terhadap total PDRB yang berbeda. Hal ini juga menandakan terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian Pada penelitian ini, analisis akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada analisis pertumbuhan

ekonomi, daerah kabupaten/kota akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapitanya serta mengklasifikasikan sektor-sektor berdasarkan percepatan pertumbuhan dan pangsaanya dengan Tipologi Klassen sebagai alat analisisnya. Analisis ketimpangan ekonomi akan disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson. Selanjutnya, *Entropy Theil* digunakan mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Identifikasi hubungan antara pertumbuhan dan disparitas pendapatan apakah terjadi *tradeoff* dengan menggunakan hipotesis Kuznets. Adapun variabel yang digunakan adalah PDRB, PDRB perkapita, jumlah penduduk, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2012 digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

PDRB(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan Indeks Williamson:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y^2 \cdot f/N)}}{Y}$$

Keterangan:

Y_i : pendapatan perkapita kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

Y : pendapatan perkapita rata-rata di Sulawesi Selatan

f_i : jumlah penduduk kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

N : jumlah penduduk Sulawesi Selatan

Dengan kriteria hasil uji indeks 0 s.d. 1 sebagai berikut:

a. 0 - 0,5 indeks disparitas rendah

b. 0,5 - 1 indeks disparitasnya tinggi

(Kuncoro, 2004)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ketimpangan Ekonomi

Alat analisis Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Bila angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata, sebaliknya bila angka yang ada semakin mendekati satu berarti terjadi ketimpangan yang semakin besar. Kriteria hasil uji indeks 0 s.d. 1 sebagai berikut 0-0,5 indeks disparitas rendah 0,5-1 indeks disparitasnya tinggi (Kuncoro, 2004).

Hasil analisis Williamson menunjukkan ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2015-2019 tergolong rendah dengan rata-rata 0,12 ($<0,5$). Ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 ke tahun 2019 cenderung menurun. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nilai Indeks Williamson sebesar 0,12 dan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 turun menjadi 0,11. Penurunan angka ketimpangan pada Indeks Williamson pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong rendah atau relatif merata. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 39 berikut ini:

Tabel 2
Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015–2019

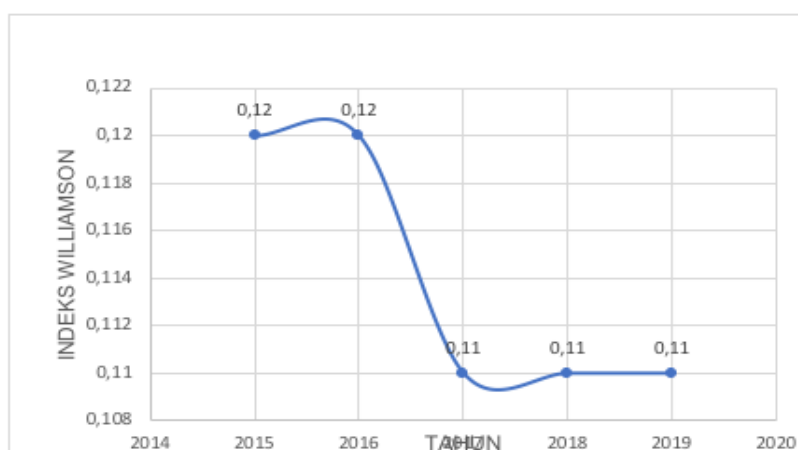
Tahun	Indeks Williamson (%)
2015	0,12
2016	0,12
2017	0,11
2018	0,11
2019	0,11
Rata-rata	0,11

Sumber: Data diolah

Nilai Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat secara rata-rata tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/kota mengalami ketimpangan yang relatif rendah karena masih dibawah 0,5. Indeks Williamson yang terus mengalami perbaikan juga bisa diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan. Kondisi ini juga terlihat pada perkembangan rata-rata pendapatan perkapita di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang terus mengalami peningkatan.

Trend Indeks Williamson di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 4
Kurva Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015–2019



Sumber: Data diolah

Hal sesuai sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Salihabror (2002) mengenai Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1996 - 2000 dengan hasil penelitian berdasarkan indeks Williamson, Kabupaten Kebumen dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan dengan rata-rata 0,385 masih diambang kritis 0,5.

Selain menggunakan Indeks Williamson, dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan juga digunakan Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil menggunakan variabel jumlah penduduk dan PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan yang ada. Adapun hasil perhitungan Indeks Entropi Theil yang diperoleh selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 38.

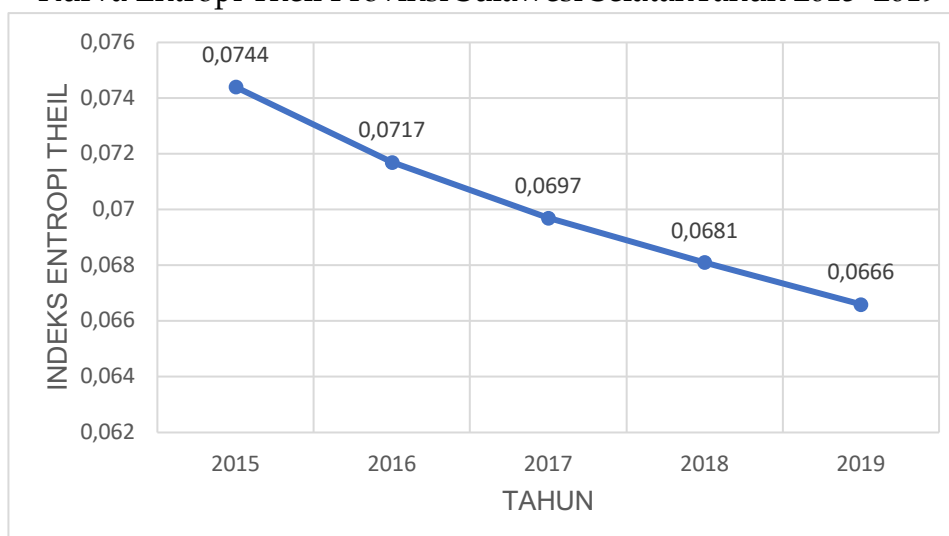
Tabel 3
Indeks Entropi Theil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	Indeks Entropi Theil (%)
2015	0,0744
2016	0,0717
2017	0,0697
2018	0,0681
2019	0,0666
Rata-rata	0,0701

Sumber: Data diolah

Pada Tabel 3 di atas, maka dapat dilihat hasil dari perhitungan analisis indeks Entropi Theil Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2015-2019, dimana nilai indeksnya rata-rata 0,0701. Hasil perhitungan indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan pada Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong rendah.

Gambar 5
Kurva Entropi Theil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber: Data diolah

Pada Gambar 5 memperlihatkan pergerakan nilai Indeks Entropi Theil dari tahun 2015 – 2019. Tahun 2015 tingkat ketimpangan sebesar 0,0744 kemudian turun pada tahun 2016 menjadi ketimpangan 0,0711. Selanjutnya tahun 2017 turun lagi menjadi 0,0697. Nilai indeks EntropiTheil terus mengalami penurunan, pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,0681 dan terakhir pada tahun 2019 menjadi 0,0666.

Tabel 39 menunjukkan angka ketimpangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2015-2019 berdasarkan rata-rata indeks Williamson sebesar 0,11 dan rata-rata indeks Entropi Theil sebesar 0,701. Angka ini menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan distribusi pendapatannya relatif merata, dengan kata lain mengalami ketimpangan/disparitas pendapatan yang rendah karena nilainya mendekati angka 0. Hasil analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi menunjukkan hal sama yaitu tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung turun selama periode tahun 2015–2019.

Tabel 4
Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015–2019

Tahun	Indeks Williamson	Indeks Entropi Theil
2015	0,12	0,0744
2016	0,12	0,0717
2017	0,11	0,0697
2018	0,11	0,0681
2019	0,11	0,0666
Rata-rata	0,11	0,0701

Sumber: Data diolah

Hasil analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Denni Iswanto (2015) mengenai Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur dengan hasil disparitas pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur Tahun 2008–2015 tergolong tinggi ($>0,5$) dengan nilai rata-rata Indeks Williamson sebesar 1,0570 dan Indeks Entropi Theil rata-rata 0,4236 dan terus mengalami kenaikan.

B. Pembuktian Hipotesis Kuznets

Kurva U Terbalik oleh Kuznets yaitu dimana pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi ketimpangan memburuk atau membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpang menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya sehingga terjadi peristiwa yang berulang kali dan jika digambarkan akan membentuk kurva U terbalik.

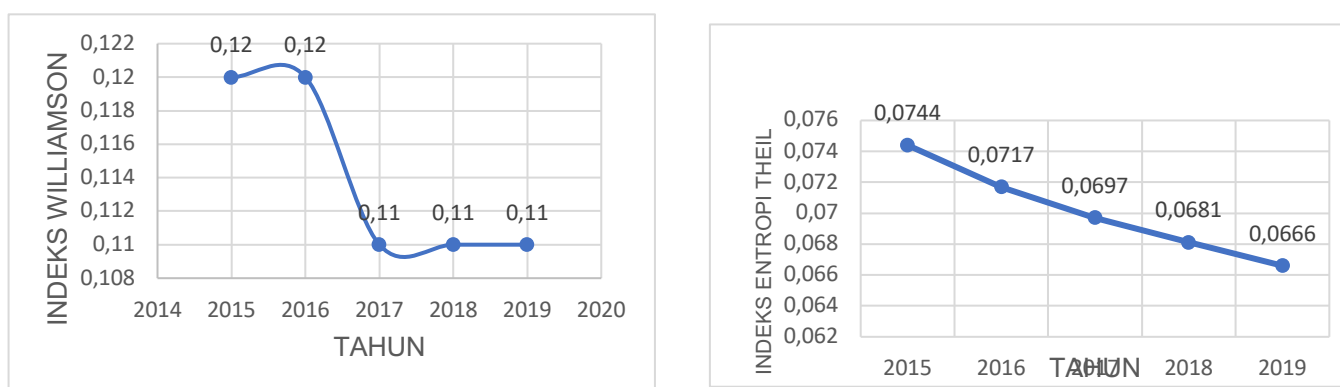
Dalam hal ini pembuktian kurva U Terbalik digunakan sebagai berikut (Kuncoro, 2004) :

- a. Menghubungkan antara angka indeks Williamson dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Menghubungkan antara angka indeks Entropi Theil dengan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan indikator apabila kedua angka indeks tersebut menggambarkan kurva U terbalik, maka teori Kuznets berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan, sebaliknya apabila kedua angka indeks tidak menggambarkan kurva U terbalik, maka teori Kuznets tidak berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Tabel 41) maka diperoleh hasil bahwa Hipotesis Kuznet tidak berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2015–2019 karena hanya Indeks Williamson yang menggambarkan kurva U Terbalik sedangkan Indeks Entropi tidak menggambarkan kurva U Terbalik. Pada periode tahun 2015–2019 nilai Indeks Entropi Theil terus menurun sebagaimana ditampilkan pada Gambar 8.

Gambar 6
Perbandingan Kurva Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil



Sumber: Data diolah

Tidak berlakunya Hipotesis Kuznet pada periode tahun 2015–2019 di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan analisis di atas menunjukkan hal sama pada periode tahun 2008–2012 di Provinsi Jawa Timur sebagaimana hasil penelitian Denni Iswanto (2015) mengenai Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN

1. Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2015–2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Namun demikian, dalam kurun waktu tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,16% lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%.
2. Hasil analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015–2019 Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas empat klasifikasi daerah yaitu: (1) Daerah Cepat-Maju dan Cepat-Tumbuh yaitu Makassar; (2) Daerah Maju Tapi Tertekan adalah Maros, Pangkajene dan Kepulauan, dan Luwu Timur; (3) Daerah Berkembang Cepat Selayar, Bantaeng, Takalar, Gowa, Sinjai, Bone, Soppeng, Pinrang, Tana Toraja, Luwu Utara dan

- Toraja Utara; (4) Daerah Relatif Tertinggal yaitu Bulukumba, Jeneponto, Barru, Wajo, Sidrap, Enrekang, Luwu, Pare-Pare dan Palopo.
3. Hasil analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropi menunjukkan hal sama yaitu tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong rendah rendah selama periode tahun 2015–2019. Indeks Kesenjangan Williamson pada periode tahun 2015–2019 mencapai nilai rata-rata 0,11 ($<0,5$) dan nilai rata-rata Indeks Theil sebesar 0,0701;
 4. Hipotesis Kuznet tidak berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2015–2019 karena hanya Indeks Williamson yang menggambarkan kurva U Terbalik sedangkan Indeks Entropi tidak menggambarkan kurva U Terbalik. Nilai Indeks Entropi Theil terus menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

SARAN

1. Diperlukan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah yang relatif tertinggal dengan memperhatikan sektor unggulan masing-masing daerah tersebut dan tanpa mengabaikan daerah yang sudah berkembang cepat.
2. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai sehingga ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. *Kertha Patrika*, 42(1), 73-86.
- Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Jogjakarta.
- Julio, J., Marwoto, P. B., & Manullang, R. R. (2019). Analisis Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar Di Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis*, 6(2), 1-11.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-29.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American economic review*, 45(1), 1-28.
- Majidi, N. (1997). Anggaran pembangunan dan ketimpangan ekonomi antar daerah. *Prisma*, 3.
- Myrdal, G., & Sitohang, P. (1957). Economic theory and under-developed regions.
- Romli, L. (2008). Masalah Reformasi Birokrasi. *Civil Service Journal*, 2(2 November).

- Sidik, M. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. In *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*.
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124-142.
- Utama, P. F. (2010). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008. *Jurnal Ekonomi*.